

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH UNIT SINAR BERKAH
KELURAHAN SUMUR PUTRI KECAMATAN TELUK BETUNG
SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

**PANJI YURNI
NPM 1846041010**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH UNIT SINAR BERKAH
KELURAHAN SUMUR PUTRI KECAMATAN TELUK BETUNG
SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

PANJI YURNI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
GELAR SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH UNIT SINAR BERKAH KELURAHAN SUMUR PUTRI KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

PANJI YURNI

Program bank sampah merupakan sebuah solusi inovatif, pada dasarnya bank sampah dibuat bertujuan untuk mendorong dan memaksa masyarakat agar mau mengolah sampah yang di hasilkan sendiri sejak dari sumbernya. Kecamatan Teluk Betung Selatan telah membuat program pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kelurahan Sumur Putri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian meliputi organisasi, interpretasi dan aplikasi menunjukan bahwa implementasi program Bank Sampah Unit Sinar Berkah masih menghadapi beberapa kendala. Belum adanya anggaran yang tersedia, keterbatasan fasilitas tempat khusus penampungan sampah dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program yang diharapkan. Peningkatan komunikasi yang melibatkan ketua RT, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah setempat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan efektif dan merata. Fluktuasi harga penjualan sampah yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Program Bank Sampah Unit Sinar Berkah diperlukan penyediaan anggaran dan sarana prasarana yang memadai, peningkatan komunikasi antar pihak terkait, serta penjaminan stabilitas harga supaya lebih stabil.

Kata kunci : Implementasi Program, Program Bank Sampah, Bank Sampah Unit

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE SINAR BERKAH UNIT WASTE BANK PROGRAM SUMUR PUTRI VILLAGE SOUTH TELUK BETUNG DISTRICT BANDAR LAMPUNG CITY

By

PANJI YURNI

The waste bank program is an innovative solution, basically created to encourage and force people to process their own waste from the source. Teluk Betung Selatan Sub-district has created a waste management program through a waste bank in Sumur Putri Village. This study aims to analyze the implementation of the Waste Bank Sinar Berkah Unit program in Sumur Putri Village and identify the supporting and inhibiting factors faced in the implementation process. The research method used is a qualitative approach using interview and documentation data collection techniques. The results of the research include organization, interpretation and application, showing that the implementation of the Sinar Berkah Unit Waste Bank program still faces several obstacles. The absence of an available budget, limited facilities for special waste storage can hinder the effectiveness of the expected program implementation. Improved communication involving RT heads, community leaders, and local government parties is needed to ensure that information is delivered effectively and evenly. Fluctuations in the sales price of waste that may affect community participation. The Sinar Berkah Unit Waste Bank Program needs to provide adequate budget and infrastructure, improve communication between related parties, and ensure price stability.

Keywords : *Program Implementation, Waste Bank Program, Unit Waste Bank*

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI PROGRAM BANK
SAMPAH UNIT SINAR BERKAH
KELURAHAN SUMUR PUTRI
KECAMATAN TELUK BETUNG
SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Panji Yurni

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1846041010

Jurusan

: Administrasi Negara

Fakultas

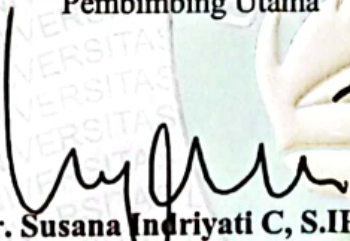
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

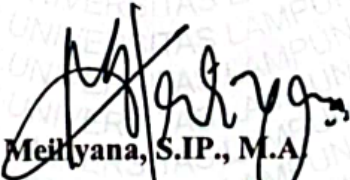

Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si.

NIP. 19700914 200604 2 001


Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.

NIP. 19821212 200801 2 017

2. Ketua Jurusan Administrasi Negara


Mellyana, S.IP., M.A.

NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si.

Sekretaris : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.

Penguji Utama : Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 10 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Panji Yurni

NPM 1846041010

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Panji Yurni. Dilahirkan di Tegal Mukti, 11 Desember 1998 Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hermansyah dan Ibu Nasroh. Penulis berkebangsaan

Indonesia dan beragama Islam. Pendidikan formal yang pernah ditempuh antara lain :

1. TK Nurul Huda pada tahun 2006.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Negeri Besar yang diselesaikan pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Negeri Besar yang diselesaikan pada tahun 2015.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 02 Negeri Besar yang diselesaikan pada tahun 2018.
5. Pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTTO

**“Pelajaran Yang Dapat Di Ambil Dari Peristiwa Ini Adalah
Jangan Pernah Menunda-Nunda Waktu”**

**Allah Tidak Membebani Seseorang Diluar Kemampuannya
(AL-Baqarah: 286)**

**Belum Pernah Aku Berurusan Dengan Sesuatu Yang Lebih Sulit
Daripada Jiwaku Sendiri, Yang Terkadang Membantuku, dan
Terkadang Menentangku.
(Imam Al-Ghazali)**

**No pain, No gain
(Marc Marquez93)**

PERSEMBAHAN

Sujud dan syukur kepada Allah ﷻ

Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu lah akhirnya skripsi yang memiliki banyak kekurangan dan sederhana ini dapat hamba selesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan atas kehadiran Rasulullah Muhammad ﷺ

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang tua yang sangat kuhormati dan kucintai

Ibu dan Ayahku tersayang

Terimakasih atas kesabarannya menunggu kelulusanku, maafkan anakku ini yang hingga detik ini belum bisa membahagiakan kalian sebagaimana anak-anak lainnya. Doaku untuk orang tuaku semoga Allah SWT selalu memberikan keselamatan, kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat untuk ibu dan ayahku. Terimakasih sekali lagi untuk ibu dan ayahku atas segalanya aku bersyukur bisa menjadi anak dari orang tua hebat seperti kalian.

Kakak dan Adikku

Saudara sedarah sekandung yang selalu memberikan warna dalam hidup terimakasih banyak semoga kita bisa sukses bersama, bahagia bersama dan hidup akur selamanya

Almamater tercinta,

Universitas Lampung

Terimakasih banyak atas semuanya

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah, skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan ini tidak lain adalah karena jasa orang-orang yang telah berperan penting di dalamnya. Untuk itulah dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., MA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing utama yang telah sabar membimbing, bersedia meluangkan waktu, serta memberikan motivasi dan dukungan untuk tidak berputus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah Ibu selalu dilancarkan oleh Allah SWT.
5. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing kedua. Terimakasih banyak telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

serta memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Semoga Ibu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan Aamiin Yarabbal Alamin.

6. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. selaku dosen penguji skripsi penulis. Terimakasih untuk semua kritik, dan saran yang diberikan untuk membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi menjadi lebih baik. Semoga setiap langkah Prof Intan selalu dilancarkan oleh Allah SWT.
7. Seluruh Dosen Administrasi Negara Universitas Lampung. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga ilmu yang didapatkan penulis selama kuliah bisa bermanfaat dan berguna untuk masa depan penulis.
8. Mba Wulan dan mba Rukiah selaku Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan pelayanan kepada penulis berkaitan dengan administrasi dalam perkuliahan maupun penyusunan skripsi.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Hermansyah dan Ibu Nasroh, atas segala cinta, kasih sayang, doa dan motivasi yang tiada henti diberikan selama ini. Mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik dan belum bisa membahagiakan ayah dan ibu ku tercinta.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya, Kuswandi, Padila, Dinda Muhareni, Rika Nuraini, Kadek Maryadi, Fiola Frasantika, Kurnia Andi, Januar Bil Huda, dan semua teman-teman Administrasi Negara 2018 (kalian Luar biasa) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
11. Terimakasih kepada Pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Selatan atas izin yang diberikan untuk melakukan penelitian skripsi saya, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT aamin yarobbal alamin.
12. Terimakasih kepada Pemerintah Kelurahan Sumur Putri dan masyarakat sumur putri atas izin dan bantuannya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT aamin yarobbal alamin.

13. Terimakasih kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung atas izin dan bantuannya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT aamin yarobbal alamin.
14. Terimakasih untuk diriku, terimakasih sudah bertahan hingga detik ini dalam menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar sarjana. Semoga kedepannya ini menjadi sebuah motivasi bahwa untuk meraih sesuatu harus berjuang dengan keras dan jangan pernah lagi menunda-nunda waktu.
HIDUP TERUS BERJALAN RODA TERUS BERPUTAR!

Akhir kata, penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi setidaknya penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar lampung, 10 Februari 2025

Penulis,

Panji Yurni

DAFTAR ISI	Halaman
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	9
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	9
2.2.2 Ruang Lingkup Kebijakan Publik	10
2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan.....	11
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	11
2.3.2 Proses Implementasi Kebijakan	12
2.3.3 Model Implementasi Kebijakan	14
2.4 Tinjauan Pengelolaan Sampah	21
2.4.1 Pengertian Sampah	21
2.4.2 Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah	22
2.5 Kerangka Pikir.....	24
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian.....	25
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian	27
3.4 Jenis Data	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28

3.6 Teknik Analisis Data	30
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	31
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Sumur Putri	33
4.1.2 Struktur Organisasi Lingkungan/RT Kelurahan Sumur Putri.....	33
4.1.3 Keadaan Penduduk	35
4.1.4 Program Bank Sampah Unit Sinar Berkah	36
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian	37
4.2.1 Hasil.....	37
4.3 Pembahasan	54
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat	71
V. KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2. Kerangka Informan	29
Tabel 3. Daftar Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian	29
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	35
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	35
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan dan Jenis Kelamin	36
Tabel 7. Data Nasabah Bank Sampah Bank Sampah Kelurahan Sumur Putri	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Proses Implementasi Kebijakan Publik	13
Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan George Edward III	17
Gambar 3. Model Elmore, Lipsky, Hjem & David O'Porter	19
Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Charles Jones	20
Gambar 5. Kerangka Pikir	24
Gambar 6. Struktur Organisasi Lingkungan/Rt Kelurahan Sumur Putri.....	34
Gambar 7. Struktur Organisasi TP. PKK Kelurahan Sumur Putri	39
Gambar 8. Struktur Organisasi dan Tugas Anggota Bank Sampah Kelurahan Sumur Putri	43
Gambar 9. Pelaksanaan Sosialisasi Program Bank Sampah Oleh Ketua Tim PKK Kecamatan Teluk Betung Selatan	46
Gambar 10. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	49
Gambar 11. Penimbangan Sampah Pada Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri	50
Gambar 12. Buku Tabungan Nasabah Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri	52

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan menjadi isu penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia, pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas manusia berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan, sosial dan ekonomi. Sampah adalah salah satu sumber pencemaran lingkungan akibat ulah manusia, perilaku manusia sebagai penghasil sampah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan permasalahan sampah saat ini. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang masih melakukan pengelolaan sampah secara tidak benar di tingkat rumah tangga, mulai dari pemilahan, penyimpanan, dan pembuangan sampah tidak pada tempatnya (Kahfi, 2017).

Sebagai solusi untuk menangani masalah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program Bank Sampah. Inisiatif ini berfungsi sebagai bentuk rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengedukasi masyarakat dalam memilah sampah serta meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah yang lebih bijaksana. Program ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Pendirian Bank Sampah menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar terbiasa memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah. Langkah ini penting, mengingat sampah memiliki nilai ekonomis dan pengelolaan yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru di Indonesia.

Peran Bank Sampah semakin strategis dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. PP ini mengatur kewajiban produsen untuk menjalankan prinsip 3R, seperti memproduksi kemasan yang mudah terurai secara

alami, menghasilkan sampah seminimal mungkin, menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali, serta mengambil kembali kemasan produk untuk didaur ulang atau digunakan kembali. Melalui Bank Sampah, produsen bisa bekerja sama untuk mengelola sampah produk mereka sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut (Suryani, 2014).

Pengelolaan sampah dengan metode kumpul, angkut, buang hingga saat ini masih diterapkan oleh masyarakat dikarenakan sampah dianggap sebagai barang sisa yang tidak memiliki nilai lagi. Perlu adanya perubahan terhadap paradigma ini mengingat produksi sampah terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, terbatasnya lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan (Sholihah, 2020). Perubahan mendasar terhadap paradigma pengelolaan sampah dari kumpul, angkut, buang dirubah menjadi paradigma 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.

Pada tingkat nasional pemerintah indonesia telah membuat peraturan tentang pengelolaan sampah untuk merubah paradigma pengelolaan sampah masyarakat saat ini melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Dengan tujuan memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan. Program bank sampah merupakan sebuah solusi inovatif, pada dasarnya bank sampah dibuat bertujuan untuk mendorong dan memaksa masyarakat agar mau mengolah sampah yang di hasilkan sendiri sejak dari sumbernya seperti sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, bank sampah didefinisikan sebagai fasilitas yang dirancang untuk mengelola sampah melalui penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Fasilitas ini bukan hanya sekadar tempat pengumpulan sampah, tetapi juga berfungsi

sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Dengan adanya bank sampah, masyarakat diharapkan lebih sadar akan nilai ekonomis sampah dan terdorong untuk mengubah perilaku mereka dalam mengelola sampah sehari-hari.

Bank sampah juga menjadi bagian dari penerapan konsep ekonomi sirkular, yang berupaya meminimalisir sampah melalui penggunaan kembali dan daur ulang, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru. Program ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah, misalnya melalui insentif atau keuntungan finansial dari hasil pemilahan dan penjualan sampah yang masih bernilai. Bank sampah dapat dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, atau pemerintah daerah, yang semuanya berperan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, bank sampah bukan hanya memberikan dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga mendukung penciptaan peluang ekonomi lokal dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan terkhusus untuk kota-kota besar di Indonesia.

Sebagai salah satu kota besar, Bandarlampung memiliki isu tersendiri tentang sampah dengan data yang menyebutkan bahwa kota Bandarlampung menghasilkan sampah sebanyak 694,84 ton/hari dengan presentase sampah yang tertangani mencapai 90% sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) bakung tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut (Nugroho et al., 2023). Untuk memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesehatan, pengelolaan sampah harus ditangani dan dikelola secara komprehensif, terpadu, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien. (Ayu et al., 2023).

Salah satu Kecamatan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Teluk Betung Selatan telah membuat program pengelolaan sampah melalui bank sampah, program ini di inisiasi oleh ketua pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Kecamatan Teluk Betung Selatan. Sebagai bentuk dukungan masyarakat Kecamatan Teluk Betung Selatan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, Undang-Undang No.08 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Untuk ikut berpartisipasi mengelola sampah yang berbasis masyarakat, berwawasan lingkungan dan secara berkelanjutan (Mustaurida & Tobing, 2022).

Saat ini tercatat sudah dibentuk sebanyak 4 unit bank sampah resmi di Kecamatan Teluk Betung Selatan yang tersebar pada tiga kelurahan diantaranya Kelurahan Gedung Pakuon, Kelurahan Pesawahan, dan Kelurahan Sumur Putri. Salah satunya adalah di Kelurahan Sumur Putri Rt.04 Lingkungan 2 dengan nama bank sampah unit sinar berkah yang dibentuk pada hari sabtu, 10 September 2022.

Program bank sampah Kecamatan Teluk Betung Selatan di buat untuk layanan sedot tinja yang merupakan kerjasama Tim Pengerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan Kelurahan yang ada di Kecamatan Teluk Betung Selatan dan bank sampah mandiri bina lestari, program ini merupakan upaya menjaga lingkungan tidak hanya dari pencemaran akibat sampah tetapi juga dari pencemaran air limbah seperti air tinja. Program bank sampah Kecamatan Teluk Betung Selatan menggunakan sistem paket menabung seperti bank konvensional pada umumnya tetapi dalam bentuk sampah, sampah yang di tabung adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dapat didaur ulang berupa sampah plastik, kertas, karton, kardus, logam, kaca, karet, dan tekstil.

Hasil pengumpulan sampah yang telah dipilah dan ditimbang dari masyarakat/nasabah bank sampah unit sinar berkah kemudian akan dijual kepada pengepul sampah dan nantinya hasil dari penjualan sampah tersebut bisa ditabung untuk dikonvensikan menjadi layanan arisan sedot tinja bagi para anggota nasabah bank sampah unit sinar berkah. Tujuan dari program ini di harapkan dapat meningkatkan perilaku dan kesadaran masyarakat Kecamatan Teluk Betung Selatan khususnya Kelurahan Sumur Putri agar dapat hidup dengan bersih dan sehat melalui pengelolaan sanitasi dan lingkungan dengan berbagai indikatornya

yang terdiri dari sanitasi layak dan aman, penghijauan dan pemanfaatan lahan pekarangan, pengelolaan sampah serta partisipasi masyarakat (Napitupulu, 2022).

Namun implementasi program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri mendapati kendala dalam implementasinya sehingga tidak berjalan dengan optimal bahkan program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri untuk sementara ini terpaksa berhenti, kendala yang disampaikan langsung oleh ketua pengurus bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri adalah harga penjualan sampah plastik kepada pengepul yang mengalami fluktuasi secara drastis yang menyebabkan protes dari masyarakat atau nasabah bank sampah unit sinar berkah yang merasa tidak diuntungkan dari situasi tersebut, akibatnya program bank sampah unit sinar berkah harus dihentikan untuk sementara.

Selain itu berdasarkan wawancara pra-riset peneliti kepada ketua Rt.04 lingkungan II, kurangnya komunikasi dari pihak pengurus bank sampah unit sinar berkah kepada ketua Rt.04 lingkungan II secara langsung mengenai program yang akan dibuat dan dilaksanakan sehingga ketua Rt.04 lingkungan II tidak bisa menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam mendukung program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri. Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan judul **“Implementasi Program Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas untuk melakukan penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Guna memperoleh deskripsi dan analisis tentang implementasi program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.
2. Guna teridentifikasinya faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan merealisasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai implementasi program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung
2. Manfaat Praktis, memberi masukan kepada Kelurahan Sumur Putri dalam implementasi program bank sampah unit sinar berkah Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau referensi dalam penelitian ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga (Cahyadi et al., 2018)	Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin 1. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan terkait 2. Kemudahan pelaksanaan prosedur fungsi 3. Dampak dan kinerja yang diinginkan tercapai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di kabupaten purbalingga, belum optimal berdasarkan : 1. tingkat kepatuhan implementor bank sampah terhadap kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah 2. kelancaran rutinitas fungsi bank sampah 3. kinerja bank sampah dan dampak yang ditimbulkan. Namun demikian, untuk beberapa hal telah berhasil dilakukan dengan baik, antara lain: bank sampah mampu mengedukasi masyarakat agar tidak membakar atau membuang sampah di kebun atau di pinggir sungai yang berpotensi merusak lingkungan, bank sampah mampu membuat masyarakat mau mengelola sampah

			yang dimulai dengan memilah dan mengumpulkan sampah sejak dari sumbernya, dan dengan adanya bank sampah, pola pikir masyarakat yang tadinya menganggap sampah adalah barang yang kotor menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.
2.	Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah Anggrek Di Desa Larangan Kecamatan Candi Kota Jawa Timur (Megariska & Sukmawa, 2022)	Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn ; a) standard an tujuan kebijakan b) sumber daya manusia c) komunikasi d) karakteristik pelaksana e) disposisi implementor f) keadaan lingkungan sosial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah melalui pembentukan bank sampah di desa larangan kecamatan candi belum sepenuhnya tercapai jika diihat dari model ada beberapa dimensi yang belum bisa di implementasikan dengan baik diantaranya : 1. dimensi karakteristik pelaksanaan program bank sampah meliputi pengelola, penabung, pengepul dan pemerintahan desa belum cukup baik karena adakendala dalam jadwal penim bangan sampah yang tidak teratur dan pemberian fasilitas mengalami keterlambatan. 2. dimensi Disposisi implementator pemerintahan desa dalam memberi fasilitas dalam program ini cukup lama
3.	Implementasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten	Model implementasi kebijakan Edward III ; a) komunikasi b) sumber daya c) disposisi d) struktur birokrasi	Program Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Mitra Hariwang di Desa Pasirlawang, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis belum berjalan efektif sesuai dengan empat variabel pelaksanaan program Edward III, berdasarkan temuan penelitian. Variabel tersebut antara lain: a. Komunikasi, belum adanya sosialisasi

Ciamis (wandani Ayu et al., 2023)	program kepada masyarakat luas.
	b. Sumber daya, fasilitas yang belum ada seperti tempat pengelolaan sampah masih meminjam tempat warga dan pengurus pengelolaan sampah mayoritas IRT dimana pemahaman dalam mengelola sampah masih kurang
	c. Disposisi, Pengelola bank sampah tidak diberikan anggaran, gaji, atau tunjangan lain apa pun dari pemerintah desa untuk memotivasi mereka agar berupaya lebih keras dalam mencapai tujuan mereka.
	d. Struktur birokrasi, belum terbentuk SOP dan pembagian tanggung jawab secara jelas.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada tabel diatas adalah model implementasi yang digunakan, dimana model implementasi pada penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan menurut Charles O Jones yang berfokus pada tiga indikator penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi.

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

James E. Anderson (1978), berpendapat bahwa kebijakan merupakan langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sedangkan menurut Carl Friedrich yang merupakan seorang ilmuwan politik, merumuskan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-

peluang untuk mencari tujuan atau mewujudkan sasaran yang di harapkan (Abdoellah & Rusfiana, 2016). Dalam kaitanya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah pindah
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif, secara positif kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintahan yang merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan (Pramono, 2020).

2.2.2 Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Howlet dan Rames berpendapat bahwa ruang lingkup kebijakan dapat dikategorikan kedalam proses kebijakan publik (Tresiana & Duadji, 2017). Ruang lingkup kebijakan publik antara lain adalah:

- a. Penyusunan agenda, suatu proses agar permasalahan dapat memperoleh perhatian.
- b. Formulasi kebijakan, proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan, proses melaksanakan kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Evaluasi (penilaian) kebijakan, merupakan proses penilaian terhadap hasil dan kinerja kebijakan.

2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Gagasan implementasi kebijakan menjadi semakin populer karena banyak pakar yang berbagi pendapat mereka tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahapan dari proses kebijakan, implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat (Akib, 2010).

Implementasi kebijakan adalah metode yang bertujuan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat teralisasi, dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik, Dunn mengartikan implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan keputusan yang diambil mengenai suatu kebijakan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah, dan swasta (Jumariantono, 2021). Perspektif ini sejalan dengan pernyataan Joko Widodo (2010) bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasi baik dari sektor pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan (Rahawarin, 2019). Penerapan kebijakan tidak akan dimulai kecuali tujuan dan sasaran telah ditentukan. Artinya,

pencapaian tujuan dan konsekuensi kebijakan bergantung pada seberapa baik kebijakan diimplementasikan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program kegiatan demi kepentingan masyarakat, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dilakukan melalui tahapan aktivitas/kegiatan/program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. selanjutnya untuk mendukung keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik sangat di butuhkan dukungan dan komitmen politik dari para stakeholder (politis, birokrasi, sasaran langsung kebijakan, dan masyarakat luas) untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan. Selain komitmen para stakeholder, faktor pendukung yang tidak kalah penting adalah seperti finansial, sistem manajerial yang efektif dan efisien, dan kemampuan teknis para pelaksana sangat berperan penting dalam terlaksananya kebijakan publik di lapangan (Ravyansyah dkk, 2022).

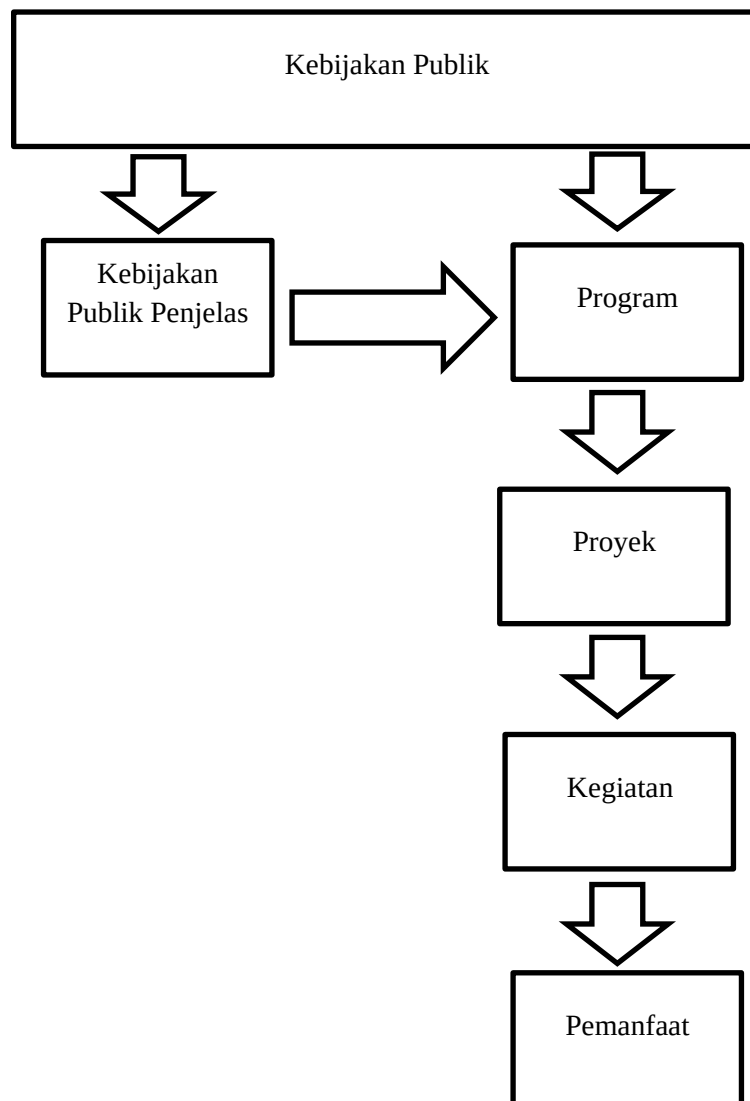
2.3.2 Proses Implementasi Kebijakan

Hal yang paling esensial dalam kebijakan negara adalah melaksanakan kebijakan, kebijakan yang telah diputuskan jika tidak dilaksanakan maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Usaha untuk melaksanakan kebijakan dibutuhkan keahlian dan keterampilan dalam menguasai persoalan yang hendak dikerjakan (Subianto, 2020). Proses pelaksanaan tugas administratif setelah penetapan suatu kebijakan dikenal sebagai implementasi kebijakan. Tugas ini berada di antara membuat kebijakan dan mengevaluasinya. Beberapa ahli membagi proses implementasi kebijakan menjadi beberapa tahapan sebagai berikut untuk memudahkan proses pembuatan kebijakan. (Purnama et al., 2022).

- a. Menurut James Anderson membagi tahapan kebijakan kedalam beberapa tahapan antara lain formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
- b. Herbert A. Simon berpendapat dalam tahapan-tahapan pembuatan kebijakan adalah inteligensi, desain, dan pilihan.

- c. Thomas R. Dye membagi tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan adalah identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan (Muadi, 2016).

Implementasi kebijakan publik secara teori adalah bagaimana suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan publik melibatkan dua langkah, langkah pertama adalah segera menuangkannya kedalam bentuk program dan langkah kedua adalah dengan membuat turunan atau kebijakan yang berasal dari kebijakan publik tersebut (Handoyo, 2012).



Gambar 1. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Sumber : Handoyo, E. 2012

Kebijakan publik pada umumnya perlu dijelaskan kepada publik, terutama melalui pembuatan peraturan. Keppres, Inpres, Inmen, Permen, Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Dinas adalah keputusan yang bersifat langsung (Handoyo, 2012).

2.3.3 Model Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan terdapat banyak model-model implementasi kebijakan menurut para ahli, semuanya mempunyai kelebihan dan kelemahan pada masing-masing model. Berikut beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli:

1. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model ini merupakan model yang paling tradisional pada tahun 1975. Menurut model ini, kinerja kebijakan publik, pelaksana, dan kebijakan berlangsung secara linier (Kadji, 2015). Berikut ini adalah beberapa variabel yang dianggap mempunyai dampak terhadap kebijakan publik :

a. Standar dan sasaran kebijakan

Tujuan kebijakan yang jelas diperlukan untuk mencegah kebingungan di antara para pelaksana kebijakan ketika mereka menjalankan tugasnya. Jika terdapat perbedaan interpretasi maka akan berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan.

b. Sumber daya

Sumber daya yang membantu pelaksanaan kebijakan mencakup sumber daya finansial, material, manusia, dan insentif. Imbalan bagi orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik biasanya berbentuk hadiah, dan bagi mereka yang melakukan pekerjaannya dengan buruk biasanya akan mendapat hukuman.

c. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Saat menerapkan kebijakan, komunikasi dianggap sangat penting. Pada hakikatnya komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk organisasi. Pelaksana kebijakan perlu berkomunikasi semaksimal mungkin untuk mencegah kesalahpahaman

atas informasi yang mereka terima. Kesalahpahaman dapat menyebabkan hasil yang buruk dan kemungkinan kegagalan implementasi kebijakan.

d. Karakteristik agen pelaksana/implementator

Menurut Ripley, terdapat enam karakteristik yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu kompetensi dan ukuran staf lembaga, tingkat pengendalian hirarkis terhadap keputusan subunit dan proses dalam lembaga pelaksana, sumber daya politik lembaga seperti dukungan dari birokrasi atas, dorongan dari organisasi, komunikasi yang terbuka (yaitu komunikasi yang terjadi secara horizontal dan vertical dalam suatu organisasi), hubungan antar lembaga formal maupun informal yang terhubung dalam penegakan kebijakan.

e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Keadaan politik, sosial, dan ekonomi merupakan variabel tambahan yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan. Jika lingkungan politik, sosial, dan ekonomi buruk, hal ini dapat mempengaruhi variabel lain dan menyebabkan kegagalan implementasi.

f. Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor

Hasil implementasi sangat dipengaruhi oleh pola pikir agen pelaksana kebijakan. Sikap ini dipengaruhi oleh opini terhadap kebijakan serta cara pandang terhadap kepentingan organisasi dan individu.

Variabel-variabel di atas mempengaruhi sikap pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankannya dan menentukan tingkat kinerja kebijakan. Cara para pelaksana merespons masing-masing faktor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kognisi, objektivitas, dan netralitas mereka. Berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan tergantung pada bagaimana masing-masing pelaksana menyikapinya. Jika sistem nilai pelaksana berbeda dengan sistem nilai pengambil kebijakan, maka implementasi tidak akan berhasil (Mustari, 2015).

2. Model kedua adalah model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Model Implementasi Kebijakan Publik Grindle (1980:7), pendanaan yang memadai dan kegiatan program yang dirancang dengan baik diperlukan agar proses implementasi kebijakan yang diinginkan dapat terwujud, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks implementasinya) (Kadji, 2015). Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

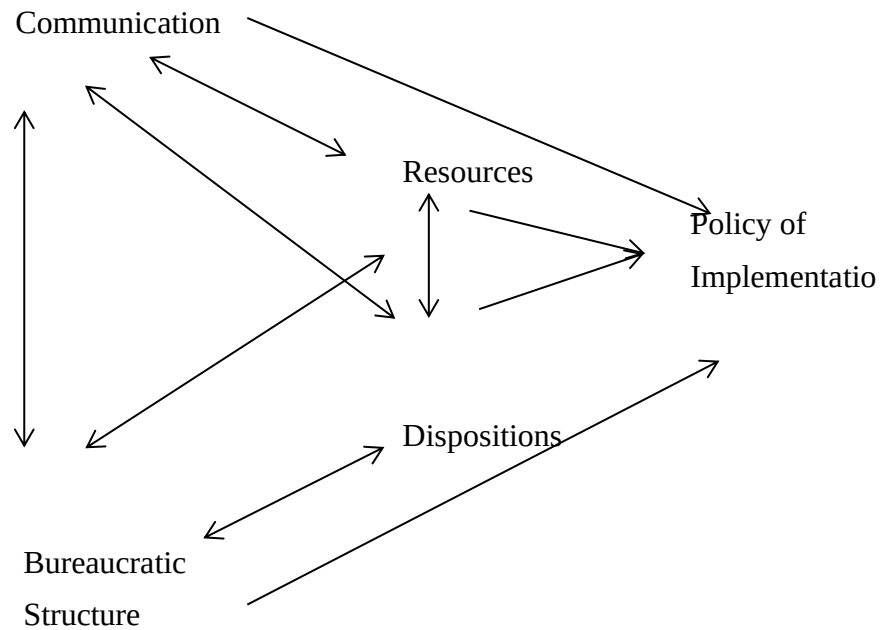
- a. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan(interest affected).
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit).
- c. Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned).
- d. Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making).
- e. Para pelaksana program (program implementators).
- f. Sumber daya yang dikerahkan (Resources committed).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

- a. Kekuasaan (power).
- b. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of actors involved).
- c. Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics).
- d. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness).

3. Model yang ketiga adalah model Implementasi kebijakan menurut George Edward III

Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Sumber : Kadji, Y. 2015

a. Komunikasi

Tindakan yang tepat harus diambil oleh para pelaksana kebijakan agar dapat berhasil. Untuk mengurangi distorsi implementasi, salah satu syarat utama agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksana kebijakan.

b. Sumber daya

Eksekusi kebijakan tidak akan berhasil meskipun isinya disampaikan secara jelas dan konsisten jika mereka yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tidak mempunyai sumber daya untuk melakukannya. Edward III membagi sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup dan relevan, kewenangan yang menjamin keberlangsungan program, serta dukungan fasilitas seperti pendanaan dan sarana prasarana dalam memberikan pelayanan publik.

c. Disposisi

Disposisi pelaksana mengacu pada kepribadian dan sifat mereka, seperti dedikasi, integritas, dan kecenderungan demokratis. Kebijakan akan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan sesuai dengan yang dikehendaki pembuat kebijakan apabila ia mempunyai disposisi yang baik. Proses penerapan kebijakan tidak akan berjalan baik bila pelaksana dan pengambil kebijakan mempunyai sudut pandang atau sikap yang berbeda.

d. Struktur birokrasi

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan adalah kerangka birokrasi yang bertugas melaksanakan hal tersebut. Memiliki prosedur operasi standar adalah salah satu elemen struktural paling penting dari setiap bisnis (SOP). SOP berfungsi sebagai panduan bagaimana melakukan setiap tugas.

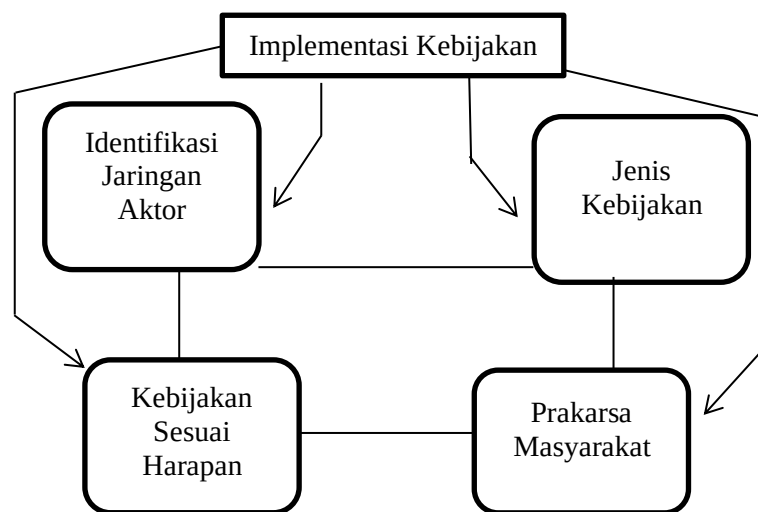
4. Model keempat adalah model implementasi dari Elmore, Lipsky, Hjem & David O'Porter.

Model implementasi yang dikembangkan secara terpisah oleh Elmore, Lipsky, Hjem & David O'Porter yang merupakan pelopor lahirnya model implementasi kebijakan dengan pendekatan *Bottom Up*. Pemikiran model implementasi kebijakan ini adalah pada pandangan kritis terhadap teori strukturalis *Top Down* yang gagal menjelaskan implementasi kebijakan pada tingkat operasional yang sulit dilaksanakan seperti kebijakan saat dibuat. Hal itu terjadi karena dalam proses implementasi penuh dengan faktor yang tidak terduga dan membutuhkan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan. Sementara itu keberadaan situasi di lapangan penuh keterbatasan (Kholifah, 2016).

Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi kebijakan ini didasari kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawah.

Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat baik secara langsung ataupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (Tahir, 2018). Secara garis besar model implementasi ini dimulai pada beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Identifikasi jaringan aktor yang terlibat
- b. Jenis kebijakan publik
- c. Kebijakan yang dibuat sesuai harapan
- d. Prakarsa masyarakat secara langsung.



Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Elmore, Lipsky, Hjem & David O'Porter
 Sumber : Tahir, A. 2014

5. Model kelima adalah model implementasi Charles O Jones (1996)

Menurut Charles O Jones implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan (Tahir, 2014). Charles O Jones berpendapat bahwa tiga aktivitas utama tersebut dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, tiga aktivitas tersebut antara lain : organisasi, interpretasi dan aplikasi.

1. Organisasi

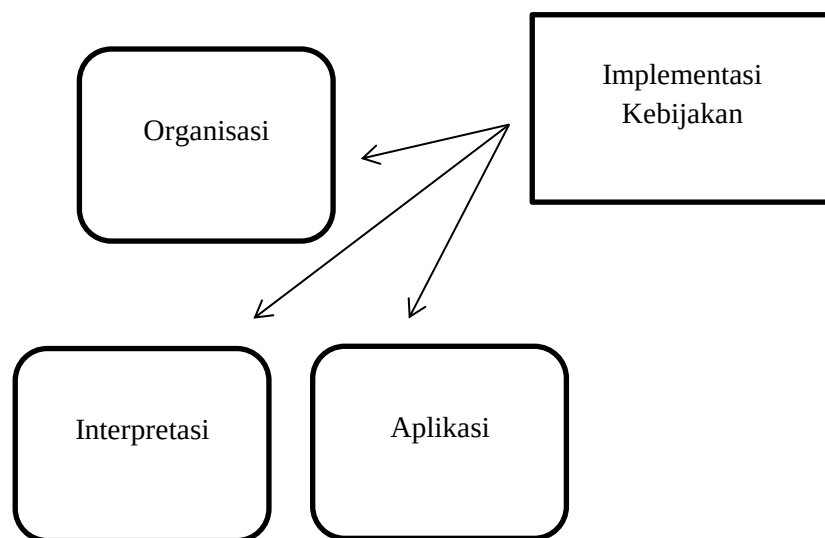
Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan (Ponto, M et al., 2016).

2. Interpretasi

Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan oleh semua pihak.

3. Aplikasi

Aplikasi, berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.



Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Charles O Jones
Sumber : Tahir, A. 2014

Dari ilustrasi yang telah digambarkan diatas menegaskan bahwa, untuk menjadi pedoman bagi para pelaksana kebijakan, harus diakui bahwa aspek yang paling berat dan menantang dari suatu kebijakan adalah saat mengimplementasikannya, karena dalam proses inilah akan banyak hal-hal yang tidak terduga akan muncul dalam proses implementasi kebijakan yang kadang tidak ditemui pada saat perumusan kebijakan. Oleh sebab itu dalam proses implementasi kebijakan perlu di organisir dengan baik, dijabarkan produk kebijakan itu ke hal-hal yang lebih

operasional, juga harus telah siap dan mudah diaplikasikan untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan bersama.

Berdasarkan model-model implementasi yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti memilih menggunakan model implementasi kebijakan menurut Charles O Jones (1996). Alasan peneliti memilih menggunakan model implementasi kebijakan dari Charles O Jones adalah karena model implementasi kebijakan ini merupakan model implementasi dengan pendekatan *Top Down*. Model implementasi kebijakan dengan pendekatan *Top Down* berfokus pada tugas dan fungsi birokrasi yang melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Pendekatan ini mengedepankan rasionalitas dan menekankan pada definisi tujuan kebijakan yang ditentukan dari atas dan dilaksanakan oleh pihak pelaksana pada level dibawahnya.

Hal ini sesuai dengan program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri yang termasuk kedalam kebijakan *Top Down* karena berfokus pada tugas dan fungsi birokrasi yang melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Selain itu, yang membedakan model implementasi Charles O. Jones dengan model lainnya adalah model implementasi Charles O. Jones berfokus pada proses tahapan dalam implementasi kebijakan sehingga sesuai dengan kebijakan pelayanan publik yang dilakukan langsung kepada masyarakat seperti program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri.

2.4 Tinjauan Pengelolaan Sampah

2.4.1 Pengertian Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, jenis-jenis sampah adalah :

- a. Sampah rumah tangga yaitu, sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari didalam keluarga. sisa makanan, plastik, kertas, karton, kotak, kain, kayu, kaca, dedaunan, logam, dan terkadang sampah berukuran besar seperti ranting pohon merupakan sebagian besar sampah yang dihasilkan.

- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu, sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, dan lainnya. umumnya sampah yang dihasilkan berupa kertas, plastik, kayu, kaca, logam, sisa sayur, buah, dan juga sisa makanan.
- c. Sampah spesifik yaitu, sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi sampah yang mengandung B3 seperti limbah berupa limbah B3 (limbah medis), baterai bekas, dan toner bekas.

2.4.2 Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah

Bidang yang berkaitan dengan pengendalian timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah serta pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang mematuhi standar terbaik untuk kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, pelestarian alam, estetika, dan faktor lingkungan lainnya serta mempertimbangkan komunitas yang lebih luas, yang dikenal sebagai pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah merupakan suatu teknik penanganan sampah yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan lingkungan (Fadhilah et al., 2011).

Untuk memberikan manfaat ekonomi dan kesehatan kepada masyarakat, menjaga keamanan lingkungan, dan mempengaruhi perilaku masyarakat maka pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu, kepastian hukum, kejelasan tugas, dan pelimpahan wewenang bagi pelaku terkait juga diperlukan dalam pengelolaan sampah. Seperti masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung kebijakan yang di implementasikan oleh pemerintah dalam sistem pengelolaan sampah itu sendiri guna tercapainya suatu tujuan yang diinginkan (Nursiah & Haris, 2018).

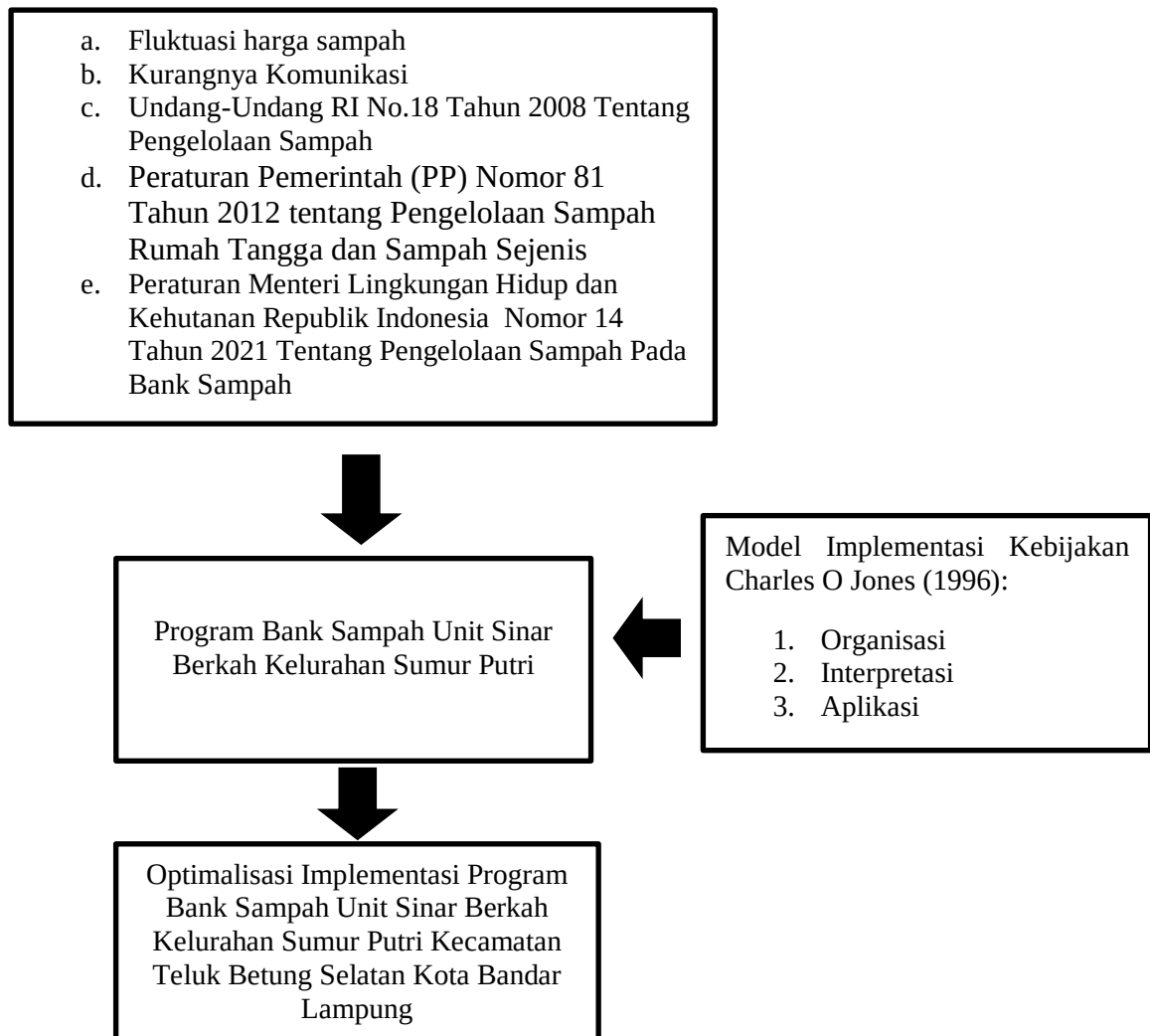
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle) sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha dan/atau pemerintah daerah. Disebutkan pada pasal 2 pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah, sampah yang di maksud adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dalam melakukan pengelolaan sampah pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk bank sampah. Tata cara dalam pengelolaan sampah pada bank sampah antara lain:

- a. Pengurangan sampah, kegiatan pengurangan sampah dilakukan melalui pemanfaatan kembali sampah seperti sampah botol plastik di manfaatkan kembali menjadi bahan kerajinan tangan tempat pensil, pot bunga dan lain-lain.
- b. Penanganan sampah, kegiatan penanganan sampah dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan.
- c. Daur ulang energi, kegiatan daur ulang energi dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, fisika, dan kimia menjadi energi.

Bank sampah menjadi alternatif untuk mengurangi produksi sampah karena secara langsung mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola sampah yang mereka hasilkan sendiri, melalui program bank sampah tidak hanya mengikutsertakan masyarakat pada proses pelaksanaan saja melainkan dapat meningkatkan pola pandang masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Dengan begitu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sampah dapat berdampak baik bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi secara berkelanjutan (Salsabila et al., 2021).

2.5 Kerangka Pikir



Gambar 5. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang melihat suatu fenomena sosial dengan membangun gambaran yang kompleks, menganalisis kata-kata, memberikan informasi yang mendalam, dan melakukan penyelidikan terhadap fenomena yang dialami (Abdussamad, 2021).

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif pada penelitian ini dikarenakan guna menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat dilihat. Peneliti perlu mengumpulkan fakta dan data untuk menghasilkan temuan yang bermakna terkait implementasi program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dari berbagai sumber lalu menelaahnya agar mendapatkan hasil yang komprehensif. Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap subjek penelitian untuk memungkinkan mereka memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Tujuan dari fokus penelitian kualitatif ini adalah untuk memberikan batasan-batasan dalam pengumpulan data, sehingga memungkinkan peneliti memusatkan usahanya pada isu sasaran penelitian. Proses penelitian sebagian besar dipandu dan diarahkan oleh fokus penelitian. Fokus penelitian implementasi program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Charles O Jones (1996). Menurut Charles O Jones (1996) terdapat 3 tahapan utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi, 3 tahapan tersebut akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

1. Organisasi

Tahapan ini berkaitan dengan kesiapan organisasi yang akan melaksanakan implementasi program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini mencakup beberapa aspek antara lain :

- a. Sumber daya yang mendukung dalam implementasi program bank sampah kelurahan sumur putri. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial berupa pendanaan dan sumber daya pendukung berupa sarana prasarana.
Edward III membagi sumber daya menjadi beberapa poin meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup dan relevan, kewenangan yang menjamin keberlangsungan program, serta dukungan pendanaan dan sarana prasarana dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Unit-unit/Struktur organisasi dalam tim pelaksana program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, guna melihat apakah pihak pembuat kebijakan telah melakukan pembagian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program.

- c. Metode yang dimaksudkan dalam kegiatan organisasi adalah tentang bagaimana suatu organisasi tersebut melakukan sesuatu untuk menjalankan kebijakan tersebut kepada masyarakat agar dapat berjalan sesuai pedoman, rencana, standar, dan tujuan yang diinginkan.

2. Interpretasi

Interpretasi adalah menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan oleh semua pihak. Tahap ini berhubungan dengan bagaimana program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri diperkenalkan baik dari pihak pembuat kebijakan kepada pihak pelaksana kebijakan dan dari pihak pelaksana kepada pihak sasaran kebijakan.

3. Aplikasi

Tahap ini berkaitan dengan implementasi kegiatan sesudah organisasi pelaksana kebijakan dan proses sosialisasi kebijakan telah siap. Penerapan kegiatan program bank sampah Kelurahan Sumur Putri berdasarkan ketentuan rutin seperti pedoman kerja, jadwal kegiatan dan hasil kegiatan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung, lokasi penelitian adalah di Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung alasan pemilihan tempat penelitian adalah saat ini terdapat sekitar 4 bank sampah unit yang tersebar di 3 Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan salah satunya berada di Kelurahan Sumur Putri Rt.4 lingkungan II. Pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kelurahan Sumur Putri mengalami berbagai kendala yang dihadapi sehingga program ini dalam proses implementasinya tidak berjalan secara optimal dan harus berhenti di laksanakan untuk saat ini, hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian di Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang di dapat atau di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, data primer dapat didefinisikan sebagai informasi segar, asli, dan terkini. Dalam mendapatkan data primer seorang peneliti harus terjun langsung dalam memperoleh data dengan kata lain data primer didapatkan dari informan pertama seperti individu atau perseorangan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan mengharuskan peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data.

2. Data sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi tambahan yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, makalah, dan catatan. Dapat juga diperoleh sebagai dokumentasi dari tempat penelitian yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan atau pelengkap untuk menunjang suatu penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti atau informan penelitian (Abdussamad, 2021). Peneliti melakukan percakapan dua arah antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai antara lain :

Tabel 2. Kerangka Informan

No	Informan	Jabatan
1	Hepri Yuliana	Ketua Pengurus Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri
2	Budi Yamin, SH.,MM	Kepala Desa Sumur Putri
3	Veni Devialesti, SP., MM	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
4	Khalida	Ketua Tim PKK Kecamatan Teluk Betung Selatan
5	Mardiah	Nasabah Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri
6	Salmi	Nasabah Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri
7	Diah	Nasabah Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri
8	Mursit	Ketua Rt.04 Lingkungan II Kelurahan Sumur Putri

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

2. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk menambah kejelasan dalam sebuah penelitian, langkah proses yang dilakukan adalah mencari informasi pada sumber-sumber tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, arsip, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk memperkuat data lapangan yang telah dikumpulkan.

Tabel 3. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian

No	Nama Dokumen
1	Dokumen SK Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri
2	Dokumen Struktur Organisasi Bank Sampah Kelurahan Sumur Putri
3	Dokumen SK Bank Sampah Kecamatan Teluk Betung Selatan
4	Buku Tabungan Nasabah Bank Sampah Unit Sinar Kelurahan Sumur Putri

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dilapangan sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain (Abdussamad, 2021).

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Menurut Miles dan Huberman (1984), teknik analisis data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Metode reduksi data meliputi pengelompokan, penekanan pada penyederhanaan, mengabstraksi informasi awal dari catatan lapangan, dan menyusun informasi tersebut sehingga dapat diambil kesimpulan. Selama penelitian dilakukan, proses ini akan terus berjalan. Pada penelitian ini dalam tahap reduksi data, peneliti memilih istilah-istilah yang dapat digunakan untuk memudahkan pembahasan serta mengidentifikasi bagian dari wawancara yang tidak memberikan informasi relevan atau terlalu umum. Misalnya, jika ada pernyataan yang tidak langsung terkait dengan implementasi program bank sampah unit sinar berkah sumur putri.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah penting yang bertujuan untuk menyusun data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dalam format yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari lokasi hasil penelitian. Penyajian data berupa teks narasi wawancara dengan narasumber di lapangan, informasi dalam bentuk bagan yang peneliti dapatkan dari hasil observasi dilapangan, serta informasi penunjang dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data yang terstruktur akan

membantu menunjukkan bagaimana implementasi program Bank Sampah Unit Sinar Berkah dapat dievaluasi dan diidentifikasi tantangan serta keberhasilannya.

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan ketika data yang didapat sudah teruji, dalam menarik sebuah kesimpulan pada penelitian, peneliti mencari arti, makna, serta memberikan penjelasan yang disusun dengan singkat sehingga dapat di pahami dengan mudah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang diambil berupa wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga mendapatkan hasil terkait penelitian implementasi program bank sampah unit sinar berkah di kelurahan sumur putri.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksudkan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, uji keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif perlu dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah agar penelitian kualitatif dapat diakui sebagai penelitian ilmiah, maka harus dilakukan pengujian keabsahan data. (Sidiq & Choiri, 2019), adapun teknik pengujian keabsahan data adalah sebagai berikut :

1. Uji Kreadibilitas (*credibility*)

Ada tiga macam triangulasi yang digunakan dalam uji kredibilitas berbasis triangulasi: triangulasi teknik, waktu, dan sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan memverifikasi kebenaran data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari banyak sumber termasuk temuan wawancara dan dokumentasi terkait pelaksanaan Program Bank Sampah Unit Sinar Berkah Desa Sumur Putri. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan wawancara kepada pengurus bank sampah, nasabah bank sampah, sekdin lingkungan hidup bandar lampung serta ketua rt setempat. Triangulasi dalam penelitian ini melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk menguji konsistensi informasi yang diperoleh.

2. Uji Transferabilitas (*transferability*)

Uji transferabilitas adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Oleh sebab itu agar orang dapat memahami hasil penelitian, peneliti membuat hasil uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan terpercaya. Dengan demikian, pembaca dapat memahami hasil penelitian ini dengan baik, sehingga mereka dapat memutuskan apakah hasil tersebut dapat diterapkan di konteks lain. Jika pembaca laporan penelitian dapat memperoleh gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana hasil penelitian dapat digunakan (*transferability*), maka laporan ini memenuhi kriteria *transferability* yang diharapkan.

3. Uji Keterandalan (*dependability*)

Uji keterandalan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, uji keterandalan dilakukan oleh dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji Objektivitas (*compermability*)

Penelitian dianggap objektif jika hasilnya diterima oleh banyak pihak. Uji *confirmability* dalam penelitian kualitatif mirip dengan uji *dependability*, sehingga kedua pengujian ini dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menilai hasil penelitian terkait dengan proses yang dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan cerminan dari proses yang diterapkan, maka penelitian tersebut memenuhi standar *confirmability*. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini, uji *confirmability* dilaksanakan bersamaan dengan uji *dependability* oleh dosen pembimbing.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Program Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri belum berjalan dengan optimal, kondisi ini di dasari oleh :

1. Organisasi telah terdapat struktur yang jelas, pembentukan pengurus, serta prosedur yang sudah terstandarisasi, menjadi kunci sukses awal program ini. Namun keterbatasan fasilitas tempat khusus penampungan sampah masih menjadi kendala pada program ini.
2. Interpretasi, nasabah Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri telah mengetahui dan memahami terkait Program Bank Sampah Unit Sinar Berkah melalui sosialisasi dan pembinaan secara intensif, termasuk penjelasan tentang tujuan dan manfaat program serta penjelasan tentang layanan tambahan seperti sedot tinja yang turut memberikan nilai ekonomis.
3. Aplikasi, kegiatan pemilahan dan pencatatan sampah telah dilaksanakan. Secara keseluruhan meskipun sudah ada keberhasilan yang terlihat, fluktuasi harga sampah yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu kelangsungan Program Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri. Menyebabkan penurunan motivasi dan minat nasabah dalam mendukung program Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri.

5.2 Saran

1. Pihak Kelurahan Sumur Putri diharapkan dapat menyediakan fasilitas khusus berupa tempat penampungan sampah yang sebelumnya meminjam pekarangan rumah ketua pengurus bank sampah unit sinar berkah. Ini akan memperkuat operasional program agar berjalan lebih maksimal.
2. Pengurus bank sampah unit sinar berkah Kelurahan Sumur Putri meningkatkan komunikasi dengan ketua RT.04 yang sebelumnya tidak ada komunikasi dengan ketua RT.04 Kelurahan Sumur Putri sehingga informasi terkait program bank sampah tidak tersebar secara luas di masyarakat. Dengan adanya komunikasi, ini akan memastikan informasi sampai ke masyarakat lebih luas lagi.
3. Memperluas jaringan pasar penjualan sampah dengan cara mencari pengepul tambahan, menjalin kerjasama dengan pabrik daur ulang sampah dan memproduksi dan menjual barang daur ulang secara mandiri seperti tas, dompet, tempat tisu, boneka dan lain sebagainya. Produk-produk ini bisa dipasarkan secara offline dan online. Dengan begitu fluktuasi harga sampah yang menjadi kendala pada Program Bank Sampah Unit Sinar Berkah Kelurahan Sumur Putri diharapkan dapat teratasi dan nasabah Bank Sampah Unit Sinar Berkah dapat termotivasi kembali dalam mendukung program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Y. A., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. ALFABETA, CV.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). CV. syakir Media Press.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana Haedar Akib Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Cahyadi, A., Siati, & Fatih, A. Al. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga. *Demograpfy Journal of Sriwijaya*, 2(2), 25–35.
- Fadhilah, A., Sugianto, H., Hadi, K., Firmandhani, S. W., Woro, T., & Pandelaki, E. E. (2011). Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. *Modul*, 11(2), 62–71.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (ed.)). Widya Karya. *Administrativa*, 5(2), 155–162. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v5i2.185> Edisi XX, 3.
- Jumarianto. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan. *Ilmu Administrasi Universitas Achmad Yani*, 6(1), 36–44.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo Anggota IKAPI.
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurisprudentie: Department of Law, Faculty of Sharia and Law*, 4(1), 12.
- Kholifah, E. (2016). *Prostitusi Masih Tetap Ada: Studi Fenomenologis Ambiguitas Individu Birokrat Lapangan Dalam Implementasi Kebijakan*. LPPM Universitas Muhammadiyah Jember Press Jl. Karimata 43 Jember Telp. 0331-336728.
- Megariska, R., & Sukmawa, H. (2022). No Title. *Jurnal Nuansa Akademik Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7 No.2 (Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah Anggrek Di Desa Larangan Kecamatan Candi).

- Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah*. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Muadi, S. S. A. M. I. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Mustaurida, R., & Tobing, M. (2022). *No Title*. Idn Times Lampung. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/rohmah-mustaurida/warga-tbs-kini-bisa-konversikan-sampah-jadi-layanan-sedot-tinja?page=all>
- Napitupulu, J. (2022). *Ibu-Ibu di Teluk Betung Selatan Ikut Arisan Sedot Tinja*. Balam Lapping.Com. https://balam.lapping.com/ibu-ibu-di-telukbetung-selatan-ikut-arisan-sedot-tinja/?amp=1#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=17115551301575&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
- Nugroho, G. P., Caturiani, S. I., & Sulistiowati, R. (2023). Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. *Jurnal*
- Nursiah, A., & Haris, R. (2018). Unm_Environmental_Journal. *UNM Environmental Journals*, 1(3), 72–76.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah
- Ponto, M, A., Pioh, R, N., & Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Progam Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Publik. *Review Politik*, 06, 195–224.
- Purnama, N. P., Manesanulu, R. S., & Sibarani, E. F. (2022). Proses Perumusan Kebijakan Kesehatan: Perumusan Masalah, Formulasi, Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi : Literature Review. *JARSI: Jurnal Administrasi RS Indonesia*, 1(1), 43–50. <https://www.jurnal.stikesbaptis.ac.id/index.php/jarsi/article/view/611>
- Rahawarin, M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur. *Badati*, 1(1), 1–24.

<https://doi.org/10.38012/jb.v1i1.192>

- Ravyansyah dkk. (2022). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. Pt.Global Eksekutif Teknologi. http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/70book_chapter_menejemen_evaluasi_kebijakan_2022.pdf
- Salsabila, A., Ramadhan2, I., Sunengsih, S. R., & Zulfaidah, Z. (2021). Program Bank Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat di Lingkungan Cipadu Jaya (Studi Kasus Masyarakat Rw 03). *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(17), 1–13. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/566>
- Sholihah, K. K. A. (2020). Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Swara Bhumi*, 03(03), 1–9.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin (ed.)). CV. Nata Karya
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*. Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang Landmark Modern Shop House.
- Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 71-84.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. ALFABETA, cv Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung Telp. (022) 200 8822 Fax. (022) 2020 373.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2017). *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek Model Model Pengolahan Pembangunan Daerah.pdf*. Suluh Media.
- Undang-Undang republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengeloaan Sampah*. Undang-Undang Republik Indonesia.
- Wandani Ayu, T., Vestikowati, E., & Sunarti, N. (2023). Implementasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9 Nomor 3 (Implementasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis), 628–645.